



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Jalan Raya Sentani – Waena TELP. (0967) 574160

Email : jayapura@ptun.org – Website : www.ptun-jayapura.go.id

J A Y A P U R A 99358

Jayapura, 11 Juli 2023

Nomor : W8-TUN3/ 1071 /OT.01.2/VII/2023
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penyampaian Laporan Bulan Mei 2023

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

Di –

M A N A D O

Dengan Hormat,

Bersama ini kami kirimkan Laporan Bulan Juni Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



KETUA,
JUSAK SINDAR, S.H
NIP. 19760401 200112 1 002

**LAPORAN BULANAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
BULAN JUNI TAHUN 2023**



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Jl. Raya Sentani - Waena

Telp. 0967-574160 | Fax. 0967-571216

Website: ptun-jayapura.go.id

Email: ptun.jayapura@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	3
Bab I. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Sejarah Singkat	5
C. Maksud Dan Tujuan	8
D. Sistematika Penyusunan Laporan	8
BAB II. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	9
A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara.	9
B. Tugas Pokok.	9
C. Fungsi.	9
D. Manajemen Kepaniteraan.	10
Struktur Organisasi.	10
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan.	11
E. Manajemen Kesekretariatan	17
1. Struktur Organisasi.	17
2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan.	18
BAB. III Kesimpulan Dan Rekomendasi.	33
A. Kesimpulan.	33
B. Rekomendasi.	33
LAMPIRAN	34
Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01.	34
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05.	36
Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.01.	38
Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.05.	41
Lampiran 5 : Laporan Perkara (LI-T1,LI-T2,LI-T3,LI-T4, LI- T5, LI-T6).	44

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua.	5
Tabel 2.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat.	6
Tabel 3.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan.	6
Tabel 4.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah.	6
Tabel 5.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan.	7
Tabel 6.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya.	7
Tabel 7.	Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	7
Tabel 8.	Laporan Keadaan Perkara Bulan Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	12
Tabel 9.	Laporan Jenis Perkara Bulan Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	12
Tabel 10.	Keadaan Keuangan Perkara Bulan Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 11.	Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Bulan Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 12.	Biaya Eksekusi s.d Bulan Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	14
Tabel 13.	Buku Register Meja Informasi Bulan Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	15
Tabel 14.	Buku Register Pelayanan Posbakum bulan Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	16
Tabel 15.	Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	18
Tabel 16.	Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	18

Tabel 17.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Juni 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 18.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Juni 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 19.	Realisasi Penerimaan PNPB Bulan Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 20.	Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	20
Tabel 21.	Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	20
Tabel 22.	Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	20
Tabel 23.	Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	22
Tabel 24.	Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	25
Tabel 25.	Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	26
Tabel 26.	Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	27
Tabel 27.	Jabatan Fungsional yang Diperbantukan pada Jabatan Administrasi Lainnya	28
Tabel 28.	Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	28
Tabel 29.	Data Promosi dan Mutasi Bulan Juni pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	29
Tabel 30.	Diklat/Bimtek SDM Teknis dan Non Teknis Hakim dan Pegawai Bulan Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	29
Tabel 31	Rekapitulasi kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ini adalah penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan pelaksanaan tugas selama satu bulan yaitu bulan Juni secara umum, kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Pengadilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Institusi Negara / Kepemimpinan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada dipercayakan ke publik.

Dalam melaksanakan tupoksi dan kebijakan di bidang pelayanan administrasi Peradilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengacu kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Misi:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas aparatur Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Berdasarkan visi dan misi diatas, dikembangkanlah nilai-nilai utama Mahkamah Agung. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Terdapat 8 nilai utama, antara lain:

1. Kemandirian
2. Integritas

3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

Oleh karena itu 8 nilai utama Mahkamah Agung harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan, serta tindakan setiap individu dalam kehidupan berorganisasi dengan pola pikir yang melayani masyarakat, profesionalitas kinerja yang tinggi, dan berorientasi pada hasil.

B. Sejarah Singkat

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1993. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkedudukan di Jln. Raya Sentani – Waena Jayapura.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat final dan mengikat .

Sedangkan Wilayah Hukum operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Adalah Wilayah Hukum Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/2538/HK.00.08/XII/2019 Tentang Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yaitu:

I. Provinsi Papua

Tabel 1. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Jayapura	Jayapura
2.	Kabupaten Jayapura	Sentani
3.	Kabupaten Keerom	Waris
4.	Kabupaten Sarmi	Sarmi
5.	Kabupaten Waropen	Botawa
6.	Kabupaten Supiori	Sorendiweri
7.	Kabupaten Mamberamo jaya	Burmeso
8.	Kabupaten Kepulauan Yapen	Serui

II. Provinsi Papua barat

Tabel 2. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Fak-fak	Fak-fak
2.	Kabupaten Kaimana	Kaimana
3.	Kabupaten Manokwari	Manokwari
4.	Kabupaten Manokwari Selatan	Ransiki
5.	Kabupaten pegunungan Arfak	Anggi
6.	Kabupaten Teluk Bintuni	Bintuni
7.	Kabupaten Teluk Wondama	Rasiei

III. Provinsi Papua Selatan

Tabel 3. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Merauke	Merauke
2.	Kabupaten Boven Digoel	Tanah Merah
3.	Kabupaten Mappi	Kepi
4.	Kabupaten Asmat	Agats

IV. Provinsi Papua Tengah

Tabel 4. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Nabire	Nabire
2.	Kabupaten Paniai	Enarotali
3.	Kabupaten Mimika	Timika
4.	Kabupaten Dogiyai	Kigamani
5.	Kabupaten Intan Jaya	Sugapa
6.	Kabupaten Deiyai	Tigi
7.	Kabupaten Puncak	Ilaga
8.	Kabupaten Puncak Jaya	Mulia

V. Provinsi Papua Pegunungan

Tabel 5. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Jayawijaya	Wamena
2.	Kabupaten Pegunungan Bintang	Oksibil
3.	Kabupaten Yahukimo	Sumohai
4.	Kabupaten Tolikara	Karubaga
5.	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakma
6.	Kabupaten Yalimo	Elekmi
7.	Kabupaten Lanny Jaya	Tiom
8.	Kabupaten Nduga	Kenyam

VI. Provinsi Papua Barat Daya

Tabel 6. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Sorong	Sorong
2.	Kabupaten Sorong	Aimas
3.	Kabupaten Sorong Selatan	Teminabuan
4.	Kabupaten Maybrat	Kamurkek
5.	Kabupaten Tambrau	Fef
6.	Kabupaten Raja Ampat	Waisai

Sejak beroperasi pada tahun 1993 sampai dengan saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengalami pergantian pucuk pimpinan sebanyak 14 kali yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	LAY MINGGUS, SH	Periode 1994 – 1997
2	SAMUEL TULAK, SH	Periode 1997 – 1999
3	DRS YANSON P. SITORUS, SH., MH	Periode 1999 – 2002
4	ANDI LUKMAN, SH	Periode 2002 – 2004
5	SANTER SITORUS, SH., M.HUM	Periode 2004 – 2006
6	ULUAN M. HUTAGALUNG, SH	Periode 2006 – 2007
7	AGUS WAHYU RAHARDI, SH., MH	Periode 2007 – 2009

8	ASMIN SIMANJORANG, SH	Periode 2009 – 2011
9	JAMRES SARAAN, SH	Periode 2011 – 2013
10	KASIM, SH.,MH	Periode 2013 – 2015
11	SINGGIH WAHYUDI, SH	Periode 2015 – 2017
12	IMANUEL MOUW, SH	Periode 2018 – 2020
13	MASDIN, S.H., M.H	Periode 2020 – 2023
14	JUSAK SINDAR, S.H	Periode 2023 – sekarang

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya laporan bulanan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja dan indikator capaian tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi wilayah hukumnya selama satu bulan periode pelaporan.

Tujuan dibuatnya laporan bulanan ini untuk memberikan dan menyediakan data dukung yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai data sumber penyusunan laporan bulanan, semester dan tahunan serta sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berada di wilayah hukumnya. Dan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura laporan bulanan ini bermanfaat sebagai laporan hasil capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

D. Sistematika Penyusunan Laporan

Mekanisme penyusunan laporan ini memanfaatkan aplikasi Sistem SIPACE yang dikembangkan oleh Pranata Komputer Tingkat Pertama.

Adapun sistematika penyajian laporan ini dapat diuraikan antara lain :

Bab I. Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan dan lingkup pekerjaan dan manfaat dokumen laporan bulanan dengan keterkaitannya terhadap laporan

Bab II. Menguraikan pelaksanaan kedudukan, tugas pokok dan fungsi pada bulan berkenaan.

Bab III. Penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

B. Tugas Pokok

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (kepegawaian, Perencanaan IT dan pelaporan, umum dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Tata Usaha Negara pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

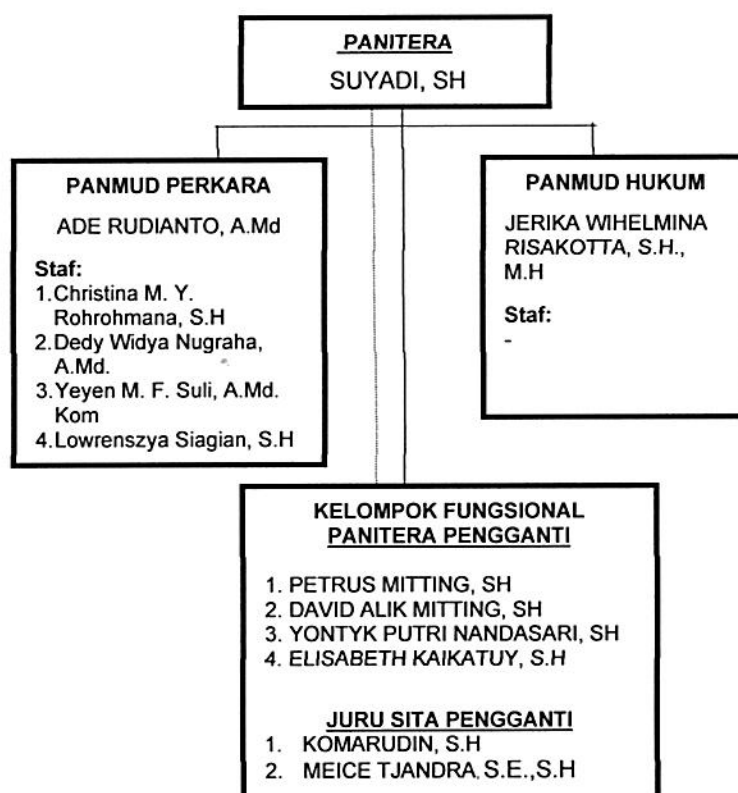
D. Manajemen Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dipimpin oleh Panitera, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
4. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
5. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

1. Struktur Organisasi Kepaniteraan

Struktur organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan

Pada bab VI tentang Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Susunan organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A terdiri atas:

a. Kepaniteraan Muda Perkara; Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Perkara menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 3) pelaksanaan penelitian administrasi gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 4) pelaksanaan penyerahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera untuk ditetapkan apakah perkara tersebut dismissal atau tidak, jika tidak akan ditetapkan atau ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa.
- 5) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 6) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak;
- 7) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung;
- 9) pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 10) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 12) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada bulan Juni 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara

1.1. Laporan Keadaan Perkara

Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan Juni Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 8. Laporan Keadaan Perkara Bulan Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PERKARA	SISA BLN LALU	MASUK BLN INI	PUTUS BLN INI	SISA SD BLN INI	KETERANGAN			
						CABUT	GUGUR	PLW	DISMISAL
1	Gugatan	15	5	11	9	-	-	-	-
2	Banding	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasasi	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PK	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Eksekusi	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Laporan Jenis Perkara

Laporan Jenis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan Juni Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 9. Laporan Jenis Perkara Bulan Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JENIS PERKARA	SISA BLN LALU	BULAN INI	S/D BLN INI
1	Pertanahan	3	-	3
2	Kepegawaian	5	1	6
3	Perijinan	-	-	-
4	Lingkungan Hidup	1	-	1
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-
8	Kepala Daerah	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-
10	Penggantian Antar Waktu	-	-	-
11	Ketenaga Kerjaan	-	-	-
12	KIP	-	-	-
13	Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Umum	-	-	-
14	Permohonan Fiktif Positif	-	-	-
15	Penyalahgunaan wewenang	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-
17	Tindakan Faktual	-	-	-
18	Merek	-	-	-
19	Lain-lain	-	4	4
Total		9	5	14

1.3. Keadaan Keuangan Perkara Bulan Juni 2023

Tabel 10. Keadaan Keuangan Perkara Bulan Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	41.371.500	-	-	41.371.500
2	Penerimaan	-	14.208.500	-	14.208.500
3	Alat Tulis Kantor	-	-	750.000	750.000
4	Biaya Panggilan	-	-	572.000	572.000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	962.000	962.000
6	Biaya Pemeriksaan setempat	-	-	-	-
7	Biaya Pemberkasan dan Pengiriman Berkas	-	-	2.880.000	2.880.000
8	Biaya Pengiriman Perkara	-	-	250.000	250.000
9	Materai	-	-	30.000	30.000
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	330.000	330.000
	b. Redaksi	-	-	30.000	30.000
	c. PNBP Lain-lain	-	-	1.103.500	1.103.500
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	7.038.000	7.038.000
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	4.000	4.000
13	Biaya Lain-lain	-	-	400.000	400.000
	Jumlah	41.371.500	14.208.500	14.349.500	41.230.500

1.4. Biaya proses/ATK/Pemberkasan s.d Bulan Juni 2023

Tabel 11. Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Bulan Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	12.456.500	-	-	12.456.500
2	Penerimaan	-	750.000	-	750.000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	506.000	506.000
	Jumlah	12.456.500	750.000	506.000	12.700.500

1.5. Biaya Eksekusi s.d Bulan Juni 2023

Tabel 12. Biaya Eksekusi s.d Bulan Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	2.157.000	-	-	2.157.000
2	Penerimaan	-	400.000	-	500.000
3	Materai	-	-	10.000	10.000
4	Biaya Surat Panggilan	-	-	120.000	120.000
5	Biaya Surat Pemberitahuan	-	-	240.000	240.000
6	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	10.000	10.000
7	Surat Pemberitahuan kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
8	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
9	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	2.157.500	400.000	380.000	2.177.000

1.6. Laporan Pelaksanaan SIPP

Secara umum penanggung jawab pelaksanaan SIPP adalah seluruh stake holder yang berkepentingan dalam alur/bisnis proses perkara. Aplikasi SIPP yang telah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah SIPP Versi 5.0.0. Rasio penanganan perkara sampai dengan akhir bulan Juni Tahun 2023 adalah 72,22%. Kendala teknis pengisian aplikasi diantaranya adalah gangguan pada jaringan internet sedangkan non teknis terkait dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik.

b. Kepaniteraan Muda Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada bulan Juni 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan

Pengelolaan dan pelayanan meja informasi mengacu pada SK KMA No.144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang telah diperbarui dengan SK KMA No. 1-144KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memiliki sarana meja informasi dan meja pengaduan. Petugas meja informasi telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/110/HM.02.3/II/2023 tentang Pengelola Meja Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Dan petugas meja pengaduan telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/109/HM.02.3/II/2023 tentang Pelayanan Pengaduan. Sarana lainnya telah tersedianya buku register meja informasi dan pengaduan.

Tabel 13. Buku Register Meja Informasi Bulan Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PEMOHON	TGL DITERIMA	OBYEK PEMOHON	TINDAK LANJUT
1	Rakhman Cahyanto, S.H	06/06/2023	Surat penetapan pencabutan perkara No.10 PTDH An. Djems Bindosano	
2	Fidelis Masriat, S.H	15/06/2023	Salinan putusan perkara nomor 34/G/2022/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
3	Yohanis Gewab, S.H	09/06/2023	Salinan putusan perkara nomor 35/G/2022/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
4	Marvey J. Daengeubun, S.H., M.H	12/06/2023	Salinan putusan perkara	Mendapat Salinan Putusan
5	Dr. Samsul Tamher	14/06/2023	Salinan putusan perkara	Mendapat Salinan Putusan
6	Erwin Hutagaul	23/06/2023	Salinan putusan perkara	Mendapat Salinan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menyiapkan sarana meja pengaduan dan petugas meja pengaduan telah ditunjuk melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Bulan ini tidak terdapat Pengaduan yang terdaftar pada buku register Bulan Juni 2023.

2. Pelayanan dan Kegiatan Posbakum

Tabel 14. Buku Register Pelayanan Posbakum bulan Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	PEMOHON	JENIS JASA	JUMLAH JAM LAYANAN	KET
1	Marthen L. Limbongan	Konsultasi masalah Pajak Kendaraan roda empat dan roda dua, meminta menyurat ke Dinas Pendapatan Daerah untuk peninjauan penetapan Pajak	1 Jam	-
2	Fionnce Fonataba	Konsultasi pengelolaan pengesahan anak 4 orang yang lahir di luar pernikahan untuk melengkapi persyaratan dari BKO Provinsi Papua	1 Jam	-
3	Hosea Wally	Konsultasi masalah tanah di sentani	1 Jam	-
4	Atik Dwi Apriyanti	Konsultasi masalah sertifikat tana	1 Jam	-

3. Tata Kelola Arsip Perkara

Pengelolaan arsip perkara dibedakan kedalam arsip perkara yang masih aktif (perkara yang belum putus atau masih dalam proses upaya hukum) berada pada kepaniteraan perkara, sedangkan arsip perkara yang sudah putus dan berkekuatan hukum tetap, dilimpahkan ke Kepaniteraan Hukum kepada Panitera Muda Hukum.

Arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dipindahkan dari ruang Kepaniteraan Hukum ke tempat ruang penyimpanan arsip perkara dengan luas penyimpanan yang tergolong kecil dan kurang memadai untuk menyimpan arsip perkara dalam jumlah banyak.

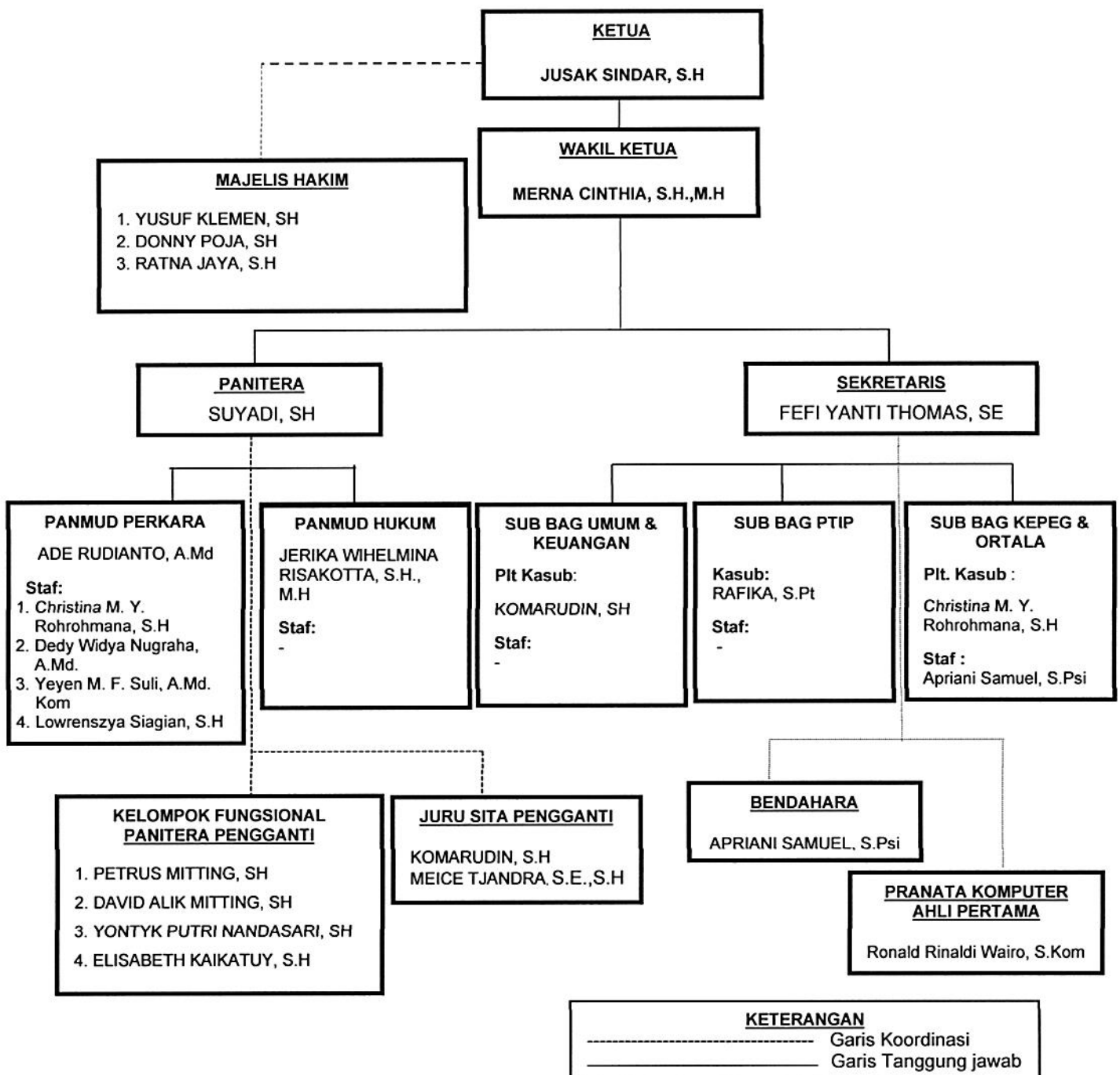
Ruang arsip perkara telah menempati ruang khusus pengarsipan yang terletak di ruangan arsip perkara. Telah dilakukan pelabelan nomor perkara pada berkas perkara.

E. Manajemen Kesekretariatan

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan telah mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada peradilan dibawahnya. Susunan struktur organisasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (Sesuai Perma No. 7 Tahun 2015)



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan

Sebagaimana tersebut pada Bab XI Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tugas pokok dan fungsi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A dipimpin oleh Sekretaris. Berdasarkan hal tersebut di atas, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

1) Sub Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan Juni 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Anggaran

- ❖ Pagu Anggaran DIPA 01 PTUN Jayapura Tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.

Tabel 15. Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Jenis Belanja	Pagu (Rp)
Belanja Pegawai	4.220.241.000
Belanja Barang	1.915.511.000
Belanja Modal	38.433.000
Total	6.174.185.000

- ❖ Pagu Anggaran DIPA 05 PTUN Jayapura Tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2023

Tabel 16. Pagu Anggaran DIPA 005.05 sampai Bulan Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Klasifikasi RO	Pagu (Rp)
Pelaksanaan Pengamanan Sidang	12.000.000
Pos Bantuan Hukum	32.900.000
Prodeo	1.400.000
Total	46.300.000

b. Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Juni 2023

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.01 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 17. Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.01)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	4.220.241.000	512.372.278	2.253.250.000	1.966.991.000
2	Barang	1.912.215.000	74.348.134	689.219.205	1.224.311.795
3	Barang Non Operasional	3.296.000	1.000.000	3.980.000	316.000
4	Modal	38.433.000	38.433.000	38.433.000	0

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 18. Realisasi Anggaran DIPA 005.05 Bulan Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.05)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	-	-	-	-
2	Barang	46.300.000	2.400.000	17.934.200	28.365.800
3	Modal	-	-	-	-

Rincian laporan realisasi anggaran manual dapat dilihat pada tabel lampiran.

1) Laporan PNPB

Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode bulan Juni Tahun 2023 secara umum sebagai berikut:

Tabel 19. Realisasi Penerimaan PNPB Bulan Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	AKUN	JENIS PENDAPATAN	BLN INI	SD BLN INI
1	425131	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	2.443.704	14.564.132
2	425232	Uang Meja (Leges)	290.000	820.000
3	425233	Ongkos Perkara	410.000	1.740.000
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.926.500	10.846.500
		Total	5.070.204	27.970.632

Laporan realisasi PNPB secara rinci dapat dilihat pada tabel lampiran.

c. Keadaan Sarana dan Prasarana

Gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdiri diatas tanah seluas 3500 m2 dengan rincian luasan gedung 1444 m2, halaman gedung 2780 m2 dan pagar 222 m2. Rumah dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 20. Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	TYPE	TAHUN	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN
1	B	1992	700 m2	200 m2
2	B	1992	700 m2	150 m2
3	C	1992	1100 m2	120 m2
4	C	1992	1100 m2	120 m2
5	C	1992	1100 m2	120 m2
6	C	1992	1100 m2	120 m2

Peruntukan rumah dinas berdasarkan +Surat Keputusan Penghunian Rumah Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	TYPE	LUAS TANAH	NO.SK	PENGGUNA	JABATAN
1	B	700 M2	W8-TUN3/70/PL.01/II/2023	Jusak Sindar, S.H	Ketua
2	B	700 M2	W8-TUN3/839/PL.01/VIII/2023	Merna Cinthia, S.H., M.H	Wakil ketua
3	C	1100 M2	W8-TUN3/720/PL.01/VII/2023	Ratna Jaya, S.H	Hakim
4	C	1100 M2	W8-TUN3/697/PL.01/VI/2023	Donny Poja, S.H	Hakim

Data kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas.

Tabel 22. Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA ASET	TAHUN	NO. PLAT	KONDISI	NO.SK	PENGGUNA	JABATAN	KET
1	Toyota Innova	2012	PA 60	Baik	W8-TUN3/387/PL.06/II/2023	JUSAK SINDAR, S.H	KETUA	
2	Toyota Vios	2006	PA 1988 DZ	Baik	W8-TUN3/504/PL.06/II/2023	MERNA CINTHIA, S.H., M.H	WAKIL KETUA	
3	Toyota Innova	2011	PA 1810 DZ	Baik	W8-TUN3/82/PL.06/II/2023	FEFI YANTI THOMAS, SE	SEKRETARIS	

4	Toyota Kijang KF 71 SPR	2003	PA 1689 DZ	Baik	W8-TUN3/88/PL.06/II/2023	SUYADI, SH	PANITERA	
5	Toyota Kijang Super	1993	PA 1697 DZ	Baik	W8-TUN3/86/PL.06/II/2023	DAVID.ALIK MITTING, SH	PANITERA PENGGANTI	
6	Honda	2011	PA 4289 DZ	Baik	W8-TUN3/905/PL.06/VI/2023	MEICE TJANDRA, S.H.,M.H	JURU SITA PENGGANTI	
7	Honda	2009	DS 6219 AF	-	-	-	-	TGR
8	Honda	2011	PA 4396 DZ	Baik	W8-TUN3/1140/PL.06/XI/2023	DAVID.ALIK MITTING, SH	PANITERA PENGGANTI	
9	Honda	2008	PA 4517 DZ	Baik	W8-TUN3/100/PL.06/II/2023	DEDY W. NUGRAHA, A.Md	PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA	PENGELOLA KEUANGAN
10	Honda	2008	DS 4301 DZ	Baik	W8-TUN3/92/PL.06/II/2023	MARTA DANGKUNG	KASUB.KEPG & ORTALA	
11	Honda	2008	PA 4743 DZ	Baik	W8-TUN3/98/PL.06/II/2023	RONALD RINALDI WAIRO, S.Kom	PRANATA KOMPUTER	
12	Honda	2005	PA 4732 DZ	Baik	W8-TUN3/90/PL.06/II/2023	PETRUS MITTING, SH	PANITERA PENGGANTI	
13	Honda	2009	PA 4658 DZ	Baik	W8-TUN3/108/PL.06/II/2023	KOMARUDIN, SH	JURU SITA PENGGANTI	PLT. KASUB UMUM DAN KEUANGAN
14	Honda	2009	PA 4372 DZ	Baik	W8-TUN3/104/PL.06/II/2023	ELIZABETH KAIKATUY, SH	PANITERA PENGGANTI	
15	Honda	2005	PA 4290 DZ	Baik	W8-TUN3/110/PL.06/II/2023	CHRISTINA.M.Y. ROHROHMANA, S.H	ANALIS PERKARA PERADILAN	BENDAHARA PENERIMAAN
16	Honda	2007	PA 4518 DZ	Baik	W8-TUN3/94/PL.06/II/2023	ADE RUDIANTO. A.Md	PANITERA MUDA PERKARA	
17	Honda	2011	PA 4132 DZ	Baik	W8-TUN3/102/PL.06/II/2023	YONTYK PUTRI NANDASARI, S.H	PANITERA PENGGANTI	PEJABAT PENGADAAN
18	Honda	2007	PA 4519 DZ	Baik	W8-TUN3/96/PL.06/II/2023	JERIKA W. RISAKOTTA, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	
19	Honda	2007	PA 3473 DZ	Baik	W8-TUN3/106/PL.06/II/2023	RAFIKA. S.Pt	KASUB PTIP	

Data Ruangan dan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 23. Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA BARANG MILIK NEGARA	STATUS			Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2	-	-	
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	-	-	
3	Sedan	1	-	-	
4	Mini Bus	3	-	1	
5	Sepeda Motor	13	-	2	
6	Kursi Roda	1	-	-	
7	Cermin	2	-	3	
8	Rak-rak Penyimpan	14	1	3	
9	Lemari Besi	3	-	7	
10	Lemari Kayu	30	6	8	
11	Brankas	2	-	-	
12	CCTV	1	-	-	
13	Papan Visual/Papan Nama	6	-	11	
14	White Board	1	-	1	
15	LCD Proyektor	1	-	-	
16	Alat Kantor Lainnya	1	-	3	
17	Meja Kerja Kayu	57	14	50	
18	Kursi Besi	29	4	44	
19	Kursi Kayu	20	31	41	
20	Sice	5	3	12	
21	Bangku Panjang Kayu	20	7	7	
22	Sketsel	2	-	-	
23	Kursi Fiber Glass	23	33	14	
24	AC Split	21	-	15	
25	Mixer	2	-	1	
26	Televisi	3	-	6	
27	Amplifire	2	1	-	
28	Loudspeaker	6	-	8	
29	Tiang Bendera	4	1	1	
30	Kaca Hias	1	-	1	
31	Palu Sidang	2	-	1	

32	Lambang Instansi	1	-	-	
33	Handycam	1	-	-	Dalam proses penghapusan karena hilang
34	Audio Mixing Console	1	-	-	
35	Microphone/Wireless Mic	6	-	2	
36	UPS	7	-	-	
37	Microphone cable	11	-	-	
38	Camera Conference	1	-	-	
39	Genset	1	-	-	
40	Walker Polding	2	-	-	
41	Komputer jaringan lainnya	3	-	-	
42	PC	25	4	13	
43	Laptop	8			
44	Notebook	9	6	5	
45	Printer	6	6	16	
46	scanner	1	-	2	
47	server	1	-	1	
48	router	1	-	1	
49	Rak server	1	-	-	
50	Bangunan Gedung kantor permanen	1	-	-	
51	Rumah negara golongan I tipe B permanen	2	-	-	
52	Rumah negara golongan I tipe C permanen	4	-	-	
53	Pagar permanen	1	-	-	
54	Referensi	18	-	-	
55	Papan pengumuman	-	1	-	
56	Meja komputer	-	1	3	
57	Meja Resepsionis	-	1	1	
58	Compact disk player	-	1	-	
59	Alat tenis meja	-	1	1	
60	Lemari Penyimpan	-	-	3	
61	Mesin ketik manual standar	-	-	3	
62	Mesin Ketik manual Langewagon	-	-	2	
63	Rak kayu	-	-	1	
64	Filling Cabinet besi	-	-	12	

65	Tempat tidur besi	-	-	1	
66	Tempat tidur kayu	-	-	3	
67	Meja telepon	-	-	1	
68	Kasur/spring bed	-	-	7	
69	Meja makan kayu	-	-	1	
70	Perkakas kantor lainnya			1	
71	Pot bunga	-	-	6	
72	Jam elektronik	-	-	10	
73	Lemari es	-	-	2	
74	Kipas angin	-	-	18	
75	Equalizer	-	-	1	
76	Sound System	-	-	1	
77	Microphone	-	-	2	
78	Microphone table stand	-	-	6	
79	Stabilisator	-	-	3	
80	Lambang Garuda Indonesia	-	-	3	
81	Gambar Presiden/Wakil Presiden	-	-	1	
82	Pataka	-	-	5	
83	Dispenser	-	-	5	
84	Mimbar/Podium	-	-	2	
85	Gordyn/kray	-	-	9	
86	Kabel roll	-	-	9	
87	Asbak tinggi	-	-	3	
88	Keset kaki	-	-	6	
89	Kabel	-	-	2	
90	Camera digital	-	-	1	
91	Key telephone	-	-	5	
92	Pesawat telephone	-	-	12	
93	Telephone mobile	-	-	2	
94	Faximili	-	-	3	
95	Antenna SHF Transportable	-	-	2	
96	Peralatan antenna SHF	-	-	2	
97	All band receiver	-	-	1	
98	Alat pemadam kebakaran	-	-	1	
99	Generator	-	-	2	
100	Stabilizer	-	-	4	

101	Internet	-	-	1	
102	Hard disk	-	-	3	
103	Rambu papan tambahan	-	-	1	
104	Monografi	-	-	2	
105	Software computer	-	-	1	

1) Penetapan Status dan Penggunaan BMN

Mengacu pada PMK Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang penetapan status BMN dan Perma Nomor: 1 Tahun 2017 tentang penetapan status BMN serta berdasar usulan penetapan status BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: W4-TUN4/928/um.03.10/1x/2017 tanggal 04 Februari 2017 SK penetapan status BMN atas Tanah dan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura belum ada.

2) Pengalihan Status dan Penghapusan BMN

Pengalihan status BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Usulan penghapusan BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah diselesaikan tuntutan ganti rugi (TGR).

d. Tata Persuratan

Mengacu pada ketentuan dalam Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Surat Masuk dan Surat Keluar kedinasan melalui satu pintu pengelolaan di bagian Umum dan Keuangan.

Tabel 24. Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	BAGIAN	JUMLAH	
		SURAT MASUK	SURAT KELUAR
1	Umum & Keuangan.	12	43
2	Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	18	36
3	Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.	4	1
4	Kepaniteraan Perkara.	21	41
5	Kepaniteraan Hukum.	2	1

1) Pengelolaan Perpustakaan

Tanggung jawab pengelolaan perpustakaan dibawah kendali Kasubbag Umum dan Keuangan dan sebagai petugas Kepustakaan (pustakawan) belum ditunjuk Penunjukan petugas perpustakaan belum dituangkan kedalam Surat

Keputusan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jumlah koleksi buku yang tersimpan di perpustakaan sampai dengan bulan Juni 2023 berjumlah 1200 (seribu dua ratus) buku. Pengelolaan database perpustakaan belum dilakukan ke dalam buku register pustaka. Pengelolaan database secara elektronik belum dilakukan melalui aplikasi **SLIM Senayan**, Sebagian buku telah dilakukan pengkodean atau labelisasi dan pemberian index pada buku koleksi.

- 2) Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan
Lemari Perpustakaan dua buah, dan meja satu buah.
- 3) Pengelolaan Aset dan BMN

2) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berjumlah 25 Orang yang terdiri dari:

Tabel 25. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	Jusak Sindar, S.H	
2.	Wakil Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	
3.	Hakim	Yusuf Klemen, SH	
4.	Hakim	Donny Poja, S.H.	
5.	Hakim	Ratna Jaya, S.H	
6.	Panitera	Suyadi, S.H	
7.	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	
8.	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	
9.	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	
10.	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	
11.	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	
12.	Panitera pengganti	Yontyk Putri Nandasari, S.H.	
13.	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	
14.	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	
15.	Juru Sita Pengganti	Komarudin, S.H	Plt. Kasub Bag Umum dan Keuangan
16.	Juru Sita Pengganti	Meice Tjandra, S.E., S.H., M.H	
17.	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura

18.	Analisis SDM Aparatur	Apriani Samuel, S.Psi	Bendahara Pengeluaran
19.	Pengelola Keuangan Perkara	Yeyen. M. F. Suli, A.Md. Kom	
20.	Analisis Perkara Peradilan	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	Plt. Kasub Kepegawaian & Ortala
21.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	
22.	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Dedy Widya Nugraha, A.Md	Pengelola BMN
23.	Analisis Perkara Peradilan	Lowrenszya Siagian, S.H	Staf Panmud Perkara

Sedangkan berdasarkan pada Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JABATAN	NAMA	GOL
1	Ketua	Jusak Sindar, S.H	IV/b
2	Wakil Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	IV/b
3	Hakim	Yusuf Klemen, SH	IV/b
4	Hakim	Ratna Jaya, S.H	IV/a
5	Hakim	Donny Poja, S.H.	III/d
6	Panitera	Suyadi, S.H	IV/a
7	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	IV/a
8	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	III/d
9	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	III/d
10	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	III/d
11	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	III/b
12	Panitera pengganti	Yontyk Putri Nandasari, S.H.	III/b
13	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	III/b
14	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	III/d
15	Juru Sita Pengganti	Komarudin, S.H	III/b
16	Juru Sita Pengganti	Meice Tjandra, S.E., S.H., S.H	III/c
17	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	IV/a
18	Analisis SDM Aparatur	Apriani Samuel, S.Psi	III/b
19	Analisis Perkara Peradilan	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	III/b
20	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	III/a
21	Analisis Perkara Peradilan	Lowrenszya Siagian, S.H	III/a

22	Pengelola Keuangan Perkara	Yeyen M. F. Suli., A.Md.Kom	II/d
23	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Dedy Widya Nugraha, A.Md	II/c

1. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi

Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi pada Pengadilan Tata usaha Negara Jayapura.

Tabel 27. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi lainnya

NO	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN ADMINISTRASI LAINNYA
1	Yontyk Putri Nandasari, S.H.	Panitera Pengganti.	Kasir
2	Christine M. Rohrohmana, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Petugas Meja I dan Plt. Kepegawaian dan Ortala
3	Komarudin, S.H	Juru Sita Pengganti	Plt. Kasub Umum dan Keuangan
4	Apriani Samuel, S.Psi	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur.	Bendahara
5	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama.	Operator SAIBA
6	Dedy Widya Nugraha, A.Md.	Pengadministrasi Registrasi Perkara.	Pembuat Daftar Gaji dan Operator BMN

Tabel 28. Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA		PENEMPATAN	TUGAS SESUAI SK
1.	Billy Langoy.	:	diperbantukan di bagian Umum dan Keuangan.	Pengemudi
2.	Syane Ratag, S.E.	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Pramubakti
3.	Esti Sitinjak, S.Kom.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
4.	Heni M. Klemen, S.H.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
5.	Rahmat, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pramubakti
6.	Izak Pattipeilohy.	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Satpam
7.	Ridwan Kristiawan, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pengemudi
8.	Jhon Lewakabessy, S.T.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Hukum.	Satpam

9.	Maikel P. kelyanin, S.T.	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.	Pramubakti
10.	Hose Pondan Mangallo, S.E	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Pramubakti

2. Promosi, Mutasi dan Pensiun

Tidak terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan Juni mendapat promosi/mutasi dan tidak terdapat pejabat atau pegawai yang pensiun.

Tabel 29. Data Promosi dan Mutasi Bulan Juni Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA	PROMOSI/MUTASI		TMT
		JABATAN LAMA	JABATAN BARU	
1.	Yontyk P. Nandasari, S.H., M.H	Panitera Pengganti PTUN Jayapura	Panitera Muda Perkara PTUN Gorontalo	-
2.	Komarudin, S.H	Jurusita Pengganti PTUN Jayapura	Panitera Pengganti PTUN Jayapura	-
3.	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	Jurusita Pengganti PTUN Ambon	Panitera Pengganti PTUN Jayapura	-
4.	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	Analisis Perkara Peradilan PTUN Jayapura	Jurusita Pengganti PTUN Jayapura	-

Tidak terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan Juni ini pensiun.

3. Diklat/Bimtek (SDM Teknik / Non Teknis)

Terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan Juni mengikuti Diklat maupun Bimtek.

Tabel 30. Diklat/Bimtek SDM Teknis dan Non Teknis Hakim dan Pegawai Bulan Juni Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT/BIMTEK	PELAKSANA
1.	Merna Cinthia, S.H., M.H	Hakim	Pelatihan Singkat Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik bagi Peradilan Tata Usaha Negara	Pusdiklat Teknis
2.	Jusuf Klemen, S.H	Hakim	Pelatihan Singkat Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik bagi Peradilan Tata Usaha Negara	Pusdiklat Teknis

3.	Donny Poja, S.H	Hakim	Pelatihan Singkat Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik bagi Peradilan Tata Usaha Negara	Pusdiklat Teknis
			Bimbingan Teknis Pedalaman Sengketa Proses Pemilu bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Dir. Pembinaan Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara
4.	Ronald Rinaldi Wairo, S.H	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pelatihan E-Learning Pejabat Pembuat Komitmen bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Calon Pejabat Pembuat Komitmen	KPPN Jayapura
5.	Jusak Sindar, S.H	Hakim	Bimbingan Teknis Pedalaman Sengketa Proses Pemilu bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Dir. Pembinaan Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara
6.	Suyadi, S.H	Panitera	Monitoring Putusan yang Ditindak Lanjuti (Eksekusi) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Dir. Pembinaan Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara
7.	Yontyk P. Nandasari, S.H., M.H	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Administrasi Upaya Hukum Banding secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Ditjen Badilmiltun
8.	Fefi Yanti Thomas, S.E	Sekretaris	Sosialisasi Petunjuk Teknis tentang Inventarisasi dan Koneksi Data Aset yang dilakukan oleh Satuan Kerja secara Mandiri	Biro Perlengkapan
9.	Dedy Widya Nugraha, A.Md	Pendaftaran Administrasi Perkara	Sosialisasi Petunjuk Teknis tentang Inventarisasi dan Koneksi Data Aset yang dilakukan oleh Satuan Kerja secara Mandiri	Biro Perlengkapan
10.	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Standarisasi Layanan Kepegawaian terkait Implementasi Aplikasi SIAN bagi Tenaga Teknis pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Ditjen Badilmiltun

11.	Esty Sitinjak, S.Kom	PPNPN	Standarisasi Layanan Kepegawaian terkait Implementasi Aplikasi SIASN bagi Tenaga Teknis pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Ditjen Badilmiltun
-----	----------------------	-------	--	--------------------

4. Pengelolaan Database SAPK dan SIKEP

Database SAPK dikelola oleh Christina M. Y. Rohrohmana, S.H sebagai administrator pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Pemutakhiran database SAPK dilakukan setiap ada perubahan data pegawai terkait dengan kenaikan pangkat, promosi/mutasi/pensiun, serta perubahan data identitas pegawai. Pada aplikasi Sikep Mahkamah Agung, pengelolaan database dilakukan oleh Marta Dangkung sebagai user administrator satuan kerja. Hasil rekapitulasi kelengkapan database pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada aplikasi SIKEP adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Rekapitulasi Kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA PEGAWAI	STATUS	KETERANGAN
1	Jusak Sindar, S.H	Lengkap	-
2	Merna Cinthia, S.H., M.H	Lengkap	-
3	Yusuf Klemen, SH	Lengkap	-
4	Donny Poja, S.H.	Lengkap	-
5	Ratna Jaya, S.H	Lengkap	-
6	Suyadi, S.H.	Lengkap	-
7	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Lengkap	-
8	Ade Rudianto, A.Md	Lengkap	-
9	Jerika Wilhelmina. Risakotta, S.H., M.H	Lengkap	-
10	Fefi Yanti Thomas, SE	Lengkap	-
11	Petrus Mitting, SH	Lengkap	-
12	Yontyk Putri Nandasari, SH	Lengkap	-
13	Elizabeth Kaikatuy, SH	Lengkap	-
14	Rafika, S.Pt	Lengkap	-
15	David Alik Mitting, SH	Lengkap	-
16	Komarudin, SH	Lengkap	-
17	Meice Tjandra, S.E.,S.H.,M.H	Lengkap	-
18	Christina M. Y. Rohrohmana, SH	Lengkap	-
19	Apriani Samuel, S.Psi	Lengkap	-
20	Yeyen M. F. Suli, A.Md.Kom	Lengkap	-

21	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Lengkap	-
22	Dedy Widya Nugraha, A.Md	Lengkap	-
23	Lowrenszya Siagian, S.H	Lengkap	-

3) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

3.1. Revisi DIPA/POK

Pada bulan Juni Tahun 2023 tidak dilakukan revisi baik itu DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Kode Satker 539138 maupun DIPA 05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Kode Satker 539139. Pagu indikatif telah ditetapkan dan telah dilakukan penyusunan anggaran baseline tahun 2024.

3.2. Pengelolaan Website dan Jaringan

Pembuatan website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sudah mengacu pada ketentuan dalam surat Ketua Mahkamah Agung SK MA 1-144 tahun 2011 yang merupakan penyempurnaan dari SK 144/2007 mengenai dasar pembuatan situs Mahkamah Agung. Alamat website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat diakses di ptun-jayapura.go.id.

Pengelolaan website sudah sepenuhnya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura termasuk akun Hosting sudah atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tanggung jawab pengelolaan ada pada Kasubag PTIP sesuai SK Nomor W4-TUN4/55/OT.01.3/1/2023 Pelaksana redaktur dan editor adalah Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom. Jaringan internet menggunakan vendor pihak ketiga yaitu Telkom Indonesia dengan kecepatan 310 Mbps dengan pengaturan 1 acces point 20 Mbps termasuk untuk kepentingan pelaksanaan SIPP sebesar 10 Mbps.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dengan luasnya wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura maka dituntut adanya pelayanan yang prima dan lebih baik terhadap masyarakat pencari keadilan. Untuk itu sangat diperlukan terpenuhinya sarana dan prasarana berupa pagar kantor yang belum diselesaikan serta Pelatihan sumber daya manusia ditingkatkan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman lebih baik kedepan.

B. Rekomendasi

Tertibnya Pelaksanaan Administrasi serta jalannya sistem peradilan yang baik hal ini tidak terlepas dari terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya yaitu adanya tertib disiplin kerja sesuai instruksi Ketua Mahkamah Agung R.I.

Maka sehubungan hal tersebut diatas maka diusulkan sebagai berikut:

1. Diharapkan segera adanya pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dan juga Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala.
2. Diharapkan realisasi penambahan pegawai sebanyak 5 (lima) orang, mengingat tenaga staf pada masing-masing Sub Bagian sangat kurang bahkan tidak ada pegawai pada bagian Umum Keuangan dan bagian Kepegawaian Ortala.
3. Diharapkan Pelatihan Aplikasi Perkantoran untuk Operator atau Admin.
4. Penambahan Anggaran DIPA tahun berikutnya pada layanan sarana internal (Belanja Modal), khususnya renovasi/pembangunan pagar yang dipandang perlu untuk segera direalisasikan mengingat tinggi pagar yang ada sekarang belum memadai untuk keamanan kantor dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Jayapura, 10 Juni 2023


JUSAK SINDAR, S.H
NIP. 19760401 200112 1 002

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05

Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.01

Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.05

Lampiran 6 : Laporan Perkara (LI – T1, LI – T2, LI – T3, LI – T4, LI – T5, LI – T6)

LAMPIRAN 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.01

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN JUNI 2023

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539138)
 PROPINSI : PAPUA (2500)
 BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
 UNIT ORGANISASI : BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
 NO. DIPA/ TGL DIPA : SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 TANGGAL 30 NOVEMBER 2022
 NO. DIPA/ TGL DIPA REVISI : SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 REVISI KE -1 TANGGAL 14 APRIL 2023

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI SID BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI SID BULAN INI		SISA DANA SID BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
				5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
1	005.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										
	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi										
	1066.EBA	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL										
	1066.EBA.962	Layanan Umum										
	051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah										
	A. 521252	Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	2.296.000	1.980.000	86.24%	0	0.00%	1.980.000	86.24%	316.000	13.76%	
	051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah										
	B. 521252	Alat bantu jalan	1.000.000	0	0.00%	1.000.000	100.00%	1.000.000	100.00%	0	0.00%	
			3.296.000	1.980.000	60.07%	1.000.000	30.34%	2.980.000	90.41%	316.000	9.59%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAC.003										
	1066.EBA.994	LAYANAN PERKANTORAN										
	001	Gaji dan Tunjangan										
	A. 511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.246.455.000	507.087.540	40.68%	176.957.100	14.20%	684.044.640	54.88%	562.410.360	45.12%	
	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.000	8.657	37.64%	2.955	12.85%	11.612	50.49%	11.388	49.51%	
	511121	Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	99.032.000	37.186.340	37.55%	12.160.990	12.28%	49.347.330	49.83%	49.684.670	50.17%	
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	30.375.000	11.672.144	38.43%	3.987.150	13.13%	15.659.294	51.55%	14.715.706	48.45%	
	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	32.760.000	14.040.000	42.86%	4.140.000	12.64%	18.180.000	55.49%	14.580.000	44.51%	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.675.850.000	608.600.000	36.32%	211.580.000	12.63%	820.180.000	48.94%	855.670.000	51.06%	
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	258.378.000	96.671.633	37.41%	44.256.223	17.13%	140.927.856	54.54%	117.450.144	45.46%	
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	73.579.000	28.316.220	38.48%	9.631.860	13.09%	37.948.080	51.57%	35.630.920	48.43%	
	511129	Belanja Uang Makan PNS	257.664.000	64.046.000	24.86%	16.231.000	6.30%	80.277.000	31.16%	177.387.000	68.84%	
	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	209.970.000	80.635.000	38.40%	16.630.000	7.92%	97.265.000	46.32%	112.705.000	53.68%	
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	19.355.000	6.815.000	35.21%	2.395.000	12.37%	9.210.000	47.58%	10.145.000	52.42%	
	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	316.800.000	72.000.000	22.73%	14.400.000	4.55%	86.400.000	27.27%	230.400.000	72.73%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAA.001	4.220.241.000	1.527.078.534	36.18%	512.372.278	12.14%	2.039.450.812	48.33%	2.160.790.188	51.67%	
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor										
	A. 521111	Belanja Kebutuhan Perkantoran	584.360.000	254.621.896	43.57%	42.692.910	7.31%	297.314.806	50.88%	287.045.194	49.12%	
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	61.147.000	37.452.170	61.25%	1.784.500	2.92%	39.236.670	64.17%	21.910.330	35.83%	
	B. 521111	Belanja Kebutuhan Perkantoran (Video Conference - Internet)	236.544.000	87.299.210	36.91%	25.453.900	10.76%	112.763.110	47.67%	123.790.890	52.33%	
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	36.000.000	5.429.580	15.08%	5.429.580	0.00%	5.429.580	15.08%	30.570.420	84.92%	
	522112	Belanja Langgananan Telepon	6.600.000	1.449.889	21.97%	704.324	10.67%	2.154.213	32.64%	4.445.787	67.36%	

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI SID BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI SID BULAN INI		SISA DANA SID BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
	522113	Belanja Langganan Air	3.600.000	221.000	6.14%	127.000	3.53%	348.000	9.67%	3.252.000	90.33%	
	522141	Belanja Sewa (Web Hosting)	7.000.000	0	0.00%		0.00%	0	0.00%	7.000.000	100.00%	
	C. 523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	498.636.000	699.000	0.14%	328.000	0.07%	1.027.000	0.21%	497.609.000	99.79%	
	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	56.020.000	55.960.257	99.89%		0.00%	55.960.257	99.89%	59.743	0.11%	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	198.472.000	71.484.970	36.02%	2.257.500	1.14%	73.742.470	37.16%	124.729.530	62.84%	
	D. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Pakaian Dinas)	34.152.000	34.000.000	99.55%		0.00%	34.000.000	99.55%	152.000	0.45%	
	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	80.604.000	20.151.000	25.00%		0.00%	20.151.000	25.00%	60.453.000	75.00%	
	H. 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	109.080.000	46.102.099	42.26%		0.00%	46.102.099	42.26%	62.977.901	57.74%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAA.002	1.912.215.000	614.871.071	32.15%	73.348.134	3.84%	688.219.205	35.99%	1.223.995.795	64.01%	
	1071	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG										
	1071.EBB.951	LAYANAN SARANA INTERNAL										
	053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran										
	A. 532111	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin (Kursi Roda)	4.000.000	0	0.00%	4.000.000	100.00%	4.000.000	100.00%	0	0.00%	
	1071.EBB.971	LAYANAN PRASARANA INTERNAL										
	051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan										
	A. 533121	Pengadaan Prasarana Disabilitas (Jalur/Toliet Disabilitas)	34.433.000	0	0.00%	34.433.000	100.00%	34.433.000	100.00%	0	0.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1071.EAD.001	38.433.000	0	0.00%	38.433.000	100.00%	38.433.000	100.00%	0	0.00%	
		JUMLAH KESELURUHAN	6.174.185.000	2.143.929.605	34.72%	625.153.412	10.13%	2.769.083.017	44.85%	3.405.101.983	55.15%	

Jumlah Anggaran	6.174.185.000	Percentase
Realisasi Anggaran	2.769.083.017	44.85%
Sisa Anggaran	3.405.101.983	55.15%



 Jayapura, 04 Juli 2023
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

 FEFYANTI THOMAS, SE.
 NIP. 19790310 200604 2 002

LAMPIRAN 2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.05

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN JUNI 2023

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539139)
 PROPINSI : PAPUA (2500)
 BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
 UNIT ORGANISASI : DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN (05)
 NO. DIPA/ TGL DIPA : SP DIPA- 005.05.2.539139/2023 TANGGAL 30 NOVEMBER 2022
 NO. DIPA/ TGL DIPA REV/ISI :

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
	005.05.BF	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM										
	1059	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA										
	1059.AEA	NEGARA										
	1059.AEA.003	Koordinasi										
I	051	Dukungan Penyelesaian Perkara										
	051	Pelaksanaan Pengamanan Sidang										
	A. 521211	Belanja Bahan (Konsumsi Pengamanan Sidang)	12,000,000	3,920,000	32.67%		0.00%	3,920,000	32.67%	8,080,000	67.33%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.001	12,000,000	3,920,000	32.67%	0	0.00%	3,920,000	32.67%	8,080,000	67.33%	
II	1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara										
	051	Pos Bantuan Hukum										
	A	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum										
	A. 521811	Belanja Barang Peralatan Barang Konsumsi (ATK Posbakum)	4,100,000	2,014,200	49.13%		0.00%	2,014,200	49.13%	2,085,800	50.87%	
	A. 522131	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	28,800,000	9,600,000	33.33%	2,400,000	8.33%	12,000,000	41.67%	16,800,000	58.33%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.001	32,900,000	11,614,200	35.30%	2,400,000	7.29%	14,014,200	42.60%	18,885,800	57.40%	

NO	KODE	JENIS BELANJAMAK	PAGU DIPA	REALISASI SID BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI SID BULAN INI		SISA DANA SID BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
III	1059.QCA.001	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang di Selesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara										
	051	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara										
	A. 521211	Penggunaan dan Penjilidan Berkas Perkara	400,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	400,000	100.00%	
	521811	Alat Tulis Kantor	100,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	100,000	100.00%	
	522151	Honorarium Untuk Ahli Penerjemah/Juru Bahasa untu Perkara Tertentu	400,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	400,000	100.00%	
	524113	Pengiriman Pemberitahuan/Panggilan	500,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	500,000	100.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.002	1,400,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1,400,000	100.00%	
		JUMLAH KESELURUHAN	46,300,000	15,534,200	33.55%	2,400,000	5.18%	17,934,200	38.73%	28,365,800	61.27%	

Jumlah Anggaran	46,300,000	Percentage
Realisasi Anggaran	17,934,200	38.73%
Sisa Anggaran	28,365,800	61.27%

Jayapura, 04 Juli 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



FEFI YANTI THOMAS, SE
NIP. 19790310 200604 2 002

LAMPIRAN 3
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.01

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Juni 2023

menterian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 it Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 ivinsi/Kabupaten/Kot : (25.51) PAPUA / KOTA JAYAPURA
 luan Kerja : (539138) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 , No. SP DIPA : 30 November 2022 , DIPA-005.01.2.539138/2023
 un Anggaran : 2023
 PN : (063) Jayapura
 mat dan No Telp :

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
2	3	4	5	6
BP Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
BP Selain Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
1. BP PNB	0,00	0,00	0,00	0,00
2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00
3. Jumlah Kas	Rp	0,00

I. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00
3. Selisih Kas	Rp	0,00

✓. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	0,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	0,00
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	0,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	0,00
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	2.443.704,00
3. Selisih	Rp	- 2.443.704,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) : Selisih sebesar Rp. 2.443.704,- merupakan penyetoran tanpa melalui bendahara penerimaan yang berupa setoran PNBP sewa rumah dinas sebesar Rp. 2.443.704,-.
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih sebesar Rp. 2.443.704,- merupakan penyetoran tanpa melalui bendahara penerimaan yang berupa setoran PNBP sewa rumah dinas sebesar Rp. 2.443.704,-.

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



FEFI YANTI THOMAS, SE

NIP 197903102006042002

KOTA JAYAPURA , 04 Juli 2023

Bendahara Penerimaan

CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROHMANA SH

NIP 198508172019032006

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Juni 2023

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNPB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	0
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	0
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0
2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	0
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	2.443.704
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 2.443.704

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

Selisih sebesar Rp. 2.443.704,- merupakan penyetoran tanpa melalui bendahara penerimaan yang berupa setoran PNPB sewa rumah dinas sebesar Rp. 2.443.704,-.

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Selisih sebesar Rp. 2.443.704,- merupakan penyetoran tanpa melalui bendahara penerimaan yang berupa setoran PNPB sewa rumah dinas sebesar Rp. 2.443.704,-.

Mengetahui

Bendahara Penerimaan

Kuasa Pengguna Anggaran



CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROHMANA SH

NIP 198508172019032006

FEFIYANTI THOMAS, SE

NIP 197903102006042002

LAMPIRAN 4

LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.05

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Juni 2023

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA
 : NEGARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (25.51) PAPUA / KOTA JAYAPURA
 Satuan Kerja : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 Tgl, No. SP DIPA : 30 November 2022 , DIPA-005.05.2.539139/2023
 Tahun Anggaran : 2023
 KPPN : (063) Jayapura
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00031/SSBP/539139/2023

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	0,00	2.626.500,00	2.626.500,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	2.626.500,00	2.626.500,00	0,00
B.	BP Selain Kas	0,00	2.626.500,00	2.626.500,00	0,00
	1. BP PNB	0,00	2.626.500,00	2.626.500,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00
3. Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00
3. Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	0,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	2.626.500,00
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	2.626.500,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	2.626.500,00
Saldo Akhir	Rp	0,00

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Juni 2023

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00031/SSBP/539139/2023

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNPB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	0
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	0
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1. Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2. Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	2.626.500
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	2.626.500
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	2.626.500
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	0

IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan



CHRISTINA M Y ROHROHMANA SH

NIP 198508172019032006

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



FEFI YANTI THOMAS, SE

NIP 197903102006042002

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	2.626.500,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	2.626.500,00
		(=)
3. Selisih	Rp	0,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) :

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



FEEI YANTI THOMAS, SE

NIP 197903102006042002

KOTA JAYAPURA , 04 Juli 2023

Bendahara Penerimaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Christina M Y Rohrohmana', is written over the printed name.

CHRISTINA M Y ROHROHMANA SH

NIP 198508172019032006

LAMPIRAN 5

LAPORAN PERKARA (LI- T1, LI – T2, LI- T3, LI- T4, LI- T5, LI – T6)



PELOJUAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
JALAN RAYA SENTANI WAEIAKEL WAEIA, DISTRIK HERANI
KOTA JAYAPURA Telp (087) 574150
Email : keperawatan@ptn-jayapura.go.id, WebSite: www.ptn-jayapura.go.id

LAPORAN KEADAAN PERKARA
BULAN JUNI TAHUN 2023

[illegible]

Jayapura, 27 Juni 2023

PANITERA

SUYADI SH
NIP. 197205151994031002

Mengantah:

MEGA

JUSAK SINDAR, SH
NIP. 197604012001121002



LAPORAN JENIS PERKARA
BULAN JUNI TAHUN 2023

Formulir LI - T2

NO	JENIS PERKARA	SISA BULAN LALU			PERKARA			PENGUGUT		TERGUGAT		PERLAWANAN		PUTUSAN						SISA PERKARA BULAN INI			Permohonan			Terima Berkas			KET.
		MASUK	DICABUT	JUMLAH	PERORANGAN	BADAN HUKUM	PUSAT	DAERAH	DISMISSAL	DITOLAK	DIKABULKAN	GUGUR	DICABUT	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIKABULKAN	JUMLAH	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
A	GUGATAN																												
1	Pertanahan	3			3	3	-		3	-	-	-	-	-	-	1			2	2	1		-	1	-	-			
2	Kepegawaian	5	1	-	6	6	-		6	-	-	-	-	-	-				6			-	-		-	-			
3	Perijinan						-				-	-	-	-	-					-	-								
4	Lingkungan Hidup	1	-		1	1	-		1	-	-	-	-	-	-				1	-	-	-	-	-	-	-			
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa						-				-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-			
6	Badan Hukum/Parpol						-				-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-			
7	Kepala Desa dan Perangkat desa						-				-	-	-	-	-					-	-	-	-	1	-	-			
8	Kepala Daerah						-				-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-			
9	Proses Pemilihan Umum						-				-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-			
10	Pergantian Antar Waktu (PAW)						-				-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-			
11	Ketenagakerjaan						-				-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-			
12	Sengketa Informasi Publik/KIP						-				-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-			
13	Pengadaan Tanah						-				-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-			
14	Fiktif Positif						-				-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-			
13	KIP						-				-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-			
15	Penyalahgunaan Wewenang						-				-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-			
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan						-				-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-			
17	Tindakan Faktual						-				-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-			
18	Merek						-				-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-			
19	Lain - Lain		4	1	3	3	-		3	-		-	-	-	-				3	-	-	1	-	-	-	-			
JUMLAH		9	5	1	13	13	-		13	-		-	-	-	-	1	-	-	12	2	1	1	-	2	-	-			

Mengetahui :
KETUA



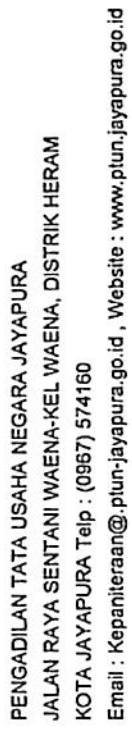
JUSAK SINDAR, SH
NIP. 197604012001121002

Jayapura, 27 Juni 2023

PANITERA,



SUTADI, SH
NIP. 197205151994031002



Formulir LI - T3

[illegible]

Jayapura, 27 Juni 2023

KETUA

PANITERA,

JUSAK SINDAR, SH

~~SUYADI, SH~~

NIP. 197604012001121002

NIP. 197205151994031002



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
JALAN RAYA SENTANI WAENA-KEL WAENA, DISTRIK HERAM
KOTA JAYAPURA Telp : (0987) 574160
Email : Kepaniteraan@ptun-jayapura.go.id , Website : www.ptun-jayapura.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM
BULAN JUNI 2023

Formulir LI - T4

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL	NAMA PENERIMA JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA	KEDUDUKAN PEMOHON BANTUAN	JENIS JASA BANTUAN	KETERANGAN
1	-	05-06-2023	Marthen L. Limbongan	ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA JUSTICE & PEACE, YULIYANTO.SH.,MH. 0811483998. Jl Jeruk Nipa Depan RS-POLRI Bhayangkara, Jayapura-Papua	Pemohon	Konsultasi masalah Pajak Kendaraan roda empat dan roda dua, meminta menyurat ke Dinas Pendapatan Daerah untuk peninjauan penetapan Pajak	
2	-	08-08-2023	Flonnce Fonataba		Pemohon	Konsultasi Pengurusan Pengesahan anak 4 orang yang lahir di luar pernikahan untuk melengkapi Persyaratan dan BKO Provinsi Papua	
3	-	19-06-2023	Hosea Wally		Pemohon	Konsultasi masalah Tanah di Sentani	
4	-	27-06-2023	Atik Dwi Apriyanti		Pemohon	Konsultasi masalah Sertifikat Tanah di Doyo Baru	

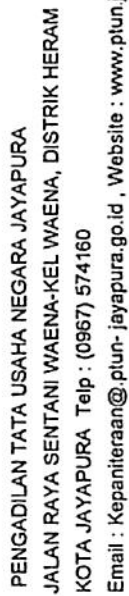
Mengetahui :
KETUA,


JUSAK SINDAR, SH
NIP. 197604012001121002

Jayapura, 27 Juni 2023

Kepaniteraan,


SUDADI, SH
NIP. 19720515199031002

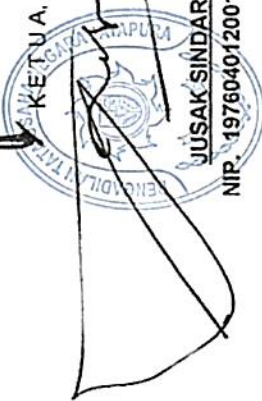


Formulir L1-T5

Jayapura, 27 Juni 2023

Mengetahui :

KETUA,



JUSAK SINDAR, SH.

NIP. 197604012001121002

of PANITERA,

SUYADI, SH

NIP. 197205151994031002



LAPORAN KEUANGAN PERKARA
(PENGADILAN TINGKAT PERTAMA)
BULAN JUNI TAHUN 2023

Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara

Form : LI-T6

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	41,371,500	-	-	41,371,500
2	Penerimaan	-	14,208,500	-	14,208,500
3	Alat Tulis Kantor	-	-	750,000	750,000
4	Biaya Panggilan	-	-	572,000	572,000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	962,000	962,000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	-	-
7	Biaya Pemberkasan Dan Pengiriman Berkas	-	-	2,880,000	2,880,000
7	Biaya Pengiriman Perkara	-	-	250,000	250,000
8	Materai	-	-	30,000	30,000
9	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	330,000	330,000
	b. Redaksi	-	-	30,000	30,000
	c. PNBP Lain-lain	-	-	1,103,500	1,103,500
10	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	7,038,000	7,038,000
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	4,000	4,000
12	Biaya Lain-lain	-	-	400,000	400,000
	Jumlah	41,371,500	14,208,500	14,349,500	41,230,500

Biaya Proses/ATK/Pemberkasan

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	12,456,500	-	-	12,456,500
2	Penerimaan	-	750,000	-	750,000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	506,000	506,000
	Jumlah	12,456,500	750,000	506,000	12,700,500

Biaya Eksekusi

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	2,157,000	-	-	2,157,000
2	Penerimaan	-	400,000	-	400,000
3	Materai	-	-	10,000	10,000
4	Biaya Surat Panggilan	-	-	120,000	120,000
5	Biaya Surat Pemberitahuan	-	-	240,000	240,000
5	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	10,000	-
6	Surat Pemberitahuan Kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
7	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
8	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	2,157,000	400,000	380,000	2,177,000

Jayapura, 27 Juni 2023

MENGETAHUI :
KETUA

JUSAK SINDAR, SH
NIP. 197604012001121002

K. PANITERA,

SUYADI, SH
NIP. 197205151994031002



**BERITA ACARA PENUTUPAN KAS
BENDAHARA PERKARA**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, saya selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah melakukan Pemeriksaan dan Penutupan Kas Bendahara Perkara dengan keadaan sebagai berikut :

Adapun hasil penutupan kas adalah sebagai berikut :

I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara :

A	1	Saldo Bulan Lalu	Rp	41.371.500	
	2	Jumlah Penerimaan	Rp	14.208.500	
	3	Jumlah Pengeluaran	Rp	14.349.500	
	4	Saldo Pembukuan	Rp	41.230.500	
	5	Saldo			Rp 41.230.500

II Saldo Menurut Kas , terdiri dari :

	1	Uang Tunai	Rp	1.373.600	
	2	Saldo Bank	Rp	39.856.900	
	3	Surat Berharga	Rp	-	
	4	Meterai	Rp	- (+)	
	5	Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4)			Rp 41.230.500

III Hasil Pemeriksaan Kas :

A Kas Perkara Yang di Kuasai Bendahara Perkara

1	Uang Tunai di Brankas				
	Uang Kertas =	100.000 x 130 lbr	Rp	1.300.000	
		10.000 x 7 lbr	Rp	70.000	
		1.000 x 3 lbr	Rp	3.000	
	Uang Logam	100 x 6	Rp	600	
	Meterai	-	Rp	- (+)	
	Jumlah				Rp 1.373.600

B Uang Kas Titipan Pihak Ketiga (Eksekusi) yang ada di Brankas

1	Uang Tunai di Brankas				
	Uang Kertas =	100.000 x 21 lbr	Rp	2.100.000	
		10.000 x 7 lbr	Rp	70.000	
		1000 x 7 lbr	Rp	7.000	
	Jumlah				Rp 2.177.000

Yang diperiksa
Kasir Perkara


YONTYK PUTRI N., S.H.
NIP. 19910111200904 2 001

Jayapura, 27 Juni 2023


Pemeriksa
Panitera
SUKADI, S.H.
NIP. 197205151994031002